

**PELAYANAN KESEHATAN IBU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK PEREMPUAN
DALAM SISTIM HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan



Nirmala Safitri

NIM 20.C2.0033

**PROGRAM STUDI HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat universal dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi oleh Negara, karena mempengaruhi penikmatan hak-hak asasi yang lain.⁷ Hak atas kesehatan pada dasarnya sama pada setiap orang, namun, karena perempuan memiliki kondisi biologis yang berbeda dari laki-laki, maka pelayanan kesehatannya pun berbeda (dikenal dengan prinsip diferensiasi).

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada seorang perempuan (ibu), Negara perlu memberikan kepastian hukum (*legalitas*) agar pelayanan kesehatan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemberi layanan (*health provider*) dan dapat memenuhi hak perempuan (*health receiver*) apapun kondisinya. Dalam tesis ini, penulis menggunakan desain penelitian *Yuridis normatif*, yang mengkaji sistim hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan dan bagaimana pemenuhan hak seorang perempuan (ibu) dengan metode *eksplanatoris*. Tujuannya untuk menjelaskan *ius Constitutum* dan *ius Constituendum* terkait pelayanan kesehatan ibu dalam sistim hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan ditinjau dari perspektif hak perempuan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa *ius constitutum* terkait pelayanan kesehatan ibu dalam sistim Hukum HAM dan sistim Hukum Kesehatan perlu disusun lebih lengkap, sistimatis dan terintegrasi, agar memenuhi hak perempuan apapun kondisinya, sehingga tidak ada kekosongan hukum atau kekeliruan dalam penyelenggaraan pelayanannya (terkait struktur, substansi dan kultur hukumnya). Sedangkan *ius constituendum* dari pelayanan kesehatan ibu adalah perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan dengan peraturan perundang-undangan yang lengkap, sistimatis dan terintegrasi terutama terkait kondisi khusus seorang perempuan, memastikan tidak ada kekosongan atau kekeliruan hukum, serta kepastian dalam penyelenggaraannya dan penegakan hukum yang *adequate*.

Keyword : Pelayanan kesehatan ibu; hak perempuan; sistim hukum di Indonesia

ABSTRACT

Health is a universal human right (HAM) and one element of welfare that must be fulfilled by the State, because it affects the enjoyment of other human rights. 7 The right to health is basically equal for everyone, however, because women have biological conditions, who are different from men, then the health services are also different (known as the principle of differentiation). In providing health services to a woman (mother), the State needs to provide legal certainty (legality) so that these health services can be carried out by the service provider (health provider) and can fulfill the rights of the woman (health recipient) whatever the conditions. In this thesis, the author uses a normative juridical research design, which examines the human rights legal system and the health legal system and how a woman's (mother's) rights are fulfilled using explanatory methods. The aim is to explain the *ius Constitutum* and *ius Constituendum* regarding maternal health services in the human rights legal system and the Health Law system viewed from the perspective of women's rights.

The results of the research found that the *ius constitutum* related to maternal health services in the Human Rights Law system and the Health Law system needs to be prepared more completely, systematically and integrated, in order to fulfill women's rights whatever their conditions, so that there is no legal vacuum or error in the implementation of services (regarding structure, substance and legal culture). Meanwhile, the *ius constituendum* of maternal health services is the need for legal protection for women with complete, systematic and integrated legislation, especially regarding the special conditions of a woman, ensuring that there are no gaps or legal errors, as well as certainty in its implementation and adequate law enforcement.

Keyword : maternal health service; women's rights; Law system in Indonesia